

## STRATEGI PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERTAHANAN MARITIM

Syaiful Hasan ✉<sup>1</sup>, Haeran<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Perwira Siswa, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta Selatan, <sup>2</sup> Dosen STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

[syaifulhasan53@gmail.com](mailto:syaifulhasan53@gmail.com), [haeran.linguistik@gmail.com](mailto:haeran.linguistik@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi yang dilakukan dalam menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus. Jenis sumber data berupa observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang diolah dengan alat analisis berupa deskriptif analisis. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pemindahan ibu kota negara dari segi pertahanan maritim adalah lemahnya sistem pertahanan maritim Indonesia serta kurangnya sinergitas antar institusi pemerintahan dengan operator atau *stakeholders* terkait. Adapun strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi pemindahan ibu kota negara dari segi pertahanan maritim adalah melakukan perubahan Gelar Kekuatan TNI untuk keamanan Ibu Kota Negara, melaksanakan perubahan strategi pertahanan serta meningkatkan kerja sama antara satu dengan yang lainnya.

**Kata Kunci:** *Strategi; Ibu Kota Negara (IKN); Pertahanan Maritim.*

### ABSTRACT

This study analyzes the strategies undertaken in dealing with the relocation of the National Capital (IKN). This research is descriptive qualitative research using a case study approach. Types of data sources in the form of observation and in-depth interviews with informants were processed with analytical tools in the form of descriptive analysis. The research results obtained show that in readiness for the transfer of IKN there are several problems, including the TNI's strength on Kalimantan Island that is not optimal, the Indonesian defense system is weak in the maritime field and there is still a lack of synergy between government institutions and related operators or stakeholders. Efforts to resolve this are in the form of changing the title of TNI forces for the security of the new capital city, as well as changing strategies in maintaining security and defence. The problem of the lack of synergy between government institutions and related operators or stakeholders can be done to increase cooperation one and other.

**Keywords:** *Strategy; Capital of Country, Diplomacy, Maritime Defense.*

## A. PENDAHULUAN

Langkah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akhir-akhir ini menjadi isu hangat bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah, terlebih di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi pemindahan ibu kota baru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur hingga tahun 2045.

Dalam berbagai diskusi maupun perdebatan terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah lain telah banyak digulirkan. Usulan agenda pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur adalah sebagai bagian dari Visi Indonesia 2033 pada tahun 2008 (Bisnis.com Jakarta, 2011) untuk merubah paradigma pembangunan nasional. Selama ini paradigma lama telah mewariskan sejumlah permasalahan besar di ibu kota Jakarta maupun permasalahan nasional. Usulan pemindahan ibu kota oleh Tim Visi Indonesia 2033 ini, lebih didasarkan pada kepentingan bangsa Indonesia di masa depan. Bertolak dari perkembangan tiga puluh tahun terakhir, terlihat adanya indikasi rendahnya kualitas kebijakan dan implementasi kebijakan strategis dalam pengelolaan pembangunan nasional, maka usulan Tim Visi Indonesia 2033 berangkat dari pertimbangan yang kompleks dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab (*underlying causes*) dan faktor-faktor penggerak (*key drivers*) secara utuh (Kementerian Pertahanan RI, 2022).

Pemindahan IKN berimplikasi pada perubahan geografi militer dan karakter ancaman yang meniscayakan adanya penyesuaian strategi pertahanan nasional. Berbeda dari Jakarta yang terletak di Pulau Jawa, Nusantara tidak berlokasi di pinggir pantai dan terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Pemindahan IKN juga menantang relevansi pembangunan pertahanan yang selama ini berpusat di pulau Jawa dan wilayah selatan Indonesia. Namun, Nusantara yang akan dibangun dari nol, memungkinkan integrasi perencanaan pertahanan dengan tata kota dilakukan secara optimal.

Perpindahan Ibu Kota Negara selain memiliki dampak positif tentu saja memiliki dampak negatif. Kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil sebagai akibat pandemi covid-19 di mana pemulihan ekonomi terus berlanjut (Alika, 2022). Indonesia membutuhkan stimulus dan alternatif skema pembiayaan untuk merealisasikan pemindahan IKN. Daya dorong pembangunan ibu kota tidak cukup memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi. Kajian Indef di awal 2020 menunjukkan pemindahan IKN hanya memicu 0,02 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak signifikan hanya dirasakan oleh provinsi bersangkutan saja dengan kenaikan pertumbuhan sekitar 3,14 persen (Vabian, 2022).

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, seharusnya tidak hanya menitikberatkan aspek perekonomian saja, namun juga dari segi aspek sosial, aspek lingkungan, geopolitik, dan aspek pertahanan. Penting bagi Indonesia mempertimbangkan kehati-hatian dalam konsep pembangunan ibu kota. Ada kekhawatiran terkait potensi tergerusnya budaya setempat dan terpinggirnya masyarakat lokal yang menuntut adanya perencanaan yang serius dari pemerintah pusat untuk menghindari dampak sosial jika wacana pemindahan ibu kota tersebut benar-benar terwujud (Taufik, 2017).

Perlu adanya kesiapan dan antisipasi dari semua elemen yang terlibat, baik pemerintah, pakar, maupun media yang berperan penting dalam membangun persepsi dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman yang dihadapi sesuai karakteristik wilayah tersebut. Hal ini karena masyarakat merupakan aktor yang memainkan peran penting dalam pertahanan dan keamanan nasional atau yang lebih kita kenal dengan sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata) (Saputra, 2021).

Berkaitan dengan uraian di atas, maka guna menghadapi perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), maka perlu adanya strategi dan kesiapan serta antisipasi dari semua elemen yang terlibat, baik pemerintah, pakar, media, maupun aparat keamanan. Aparat keamanan dalam hal ini TNI harus bisa melakukan terobosan dan merencanakan strategi melalui pertahanan maritim. Dari perspektif ilmu pertahanan, maka salah satu pertimbangan

penetapan ibu kota adalah pengendalian keamanan nasional, termasuk di dalamnya adalah pengendalian pertahanan negara (Kementerian Pertahanan RI, 2017). Pertahanan dan keamanan negara yang tangguh akan menjaga dan melindungi kedaulatan Negara Indonesia. Sebaliknya, apabila fungsi pertahanan dan keamanan lemah dapat berakibat kerawanan keamanan nasional hingga keutuhan dan kedaulatan negara dikarenakan potensi ancaman yang tidak ringan.

Pertahanan maritim dalam upaya pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan sebuah rangkaian upaya yang komprehensif dan berkelanjutan tentang pengaturan dan pengelolaan ruang wilayah yurisdiksi NKRI sebagai negara kepulauan bercirikan Nusantara, yang mengedepankan aspek kemaritiman, dengan cakupan ruang darat, ruang laut dan ruang udara sebagai suatu kesatuan secara holistik, terhadap seluruh kemampuan dan kekuatan dari sistem pertahanan negara, yang ditata secara tepat dan bijaksana sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (Witjaksono, 2020). Pertahanan maritim adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara melalui wilayah kelautannya (Mikhael Ryano, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan perpindahan ibu kota negara telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di antaranya: (1) Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, dan Mhd Halkis dengan judul penelitian: “Analisis Strategi Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara) (2021); (2) Herlambang Suryo Putro dan Sumiyat dengan judul: Peran TNI AL dalam Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia (2022); (3) Curie Maharani, dkk. dengan judul penelitian: “Pertahanan Ibu Kota Negara Strategi dan Gelar Militer; dan (4) Suryadi Jaya Purnama dan Chotib dengan judul penelitian: “Analisis Kebijakan

Publik Pemindahan Ibu Kota Negara (*Analysis of The National Capital Relocation Policy*), *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*.

Dari empat penelitian terdahulu belum satupun dari penelitian-penelitian tersebut yang membahas tentang pemindahan ibu kota negara dari perspektif pertahanan maritim. Penelitian Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, dan Mhd Halkis hanya mengkaji dari segi ekonomi pertahanan. Penelitian Herlambang Suryo Putro dan Sumiyat meneliti terkait pemindahan ibu kota negara dalam rangka terwujudnya poros maritim dunia. Demikian juga dengan penelitian Curie Maharani, dkk. hanya sebatas strategi dan gelar militer. Termasuk dengan penelitian Suryadi Jaya Purnama dan Chotib terbatas pada kebijakan public pemindahan ibu kota. Dengan pertimbangan tersebut, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan mengkaji pemindahan ibu kota negara ditinjau dari perspektif pertahanan maritim. Dari sini sangat jelas kebaruan (*novelty*) penelitian, sehingga sangat patut untuk ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan.

Pemindahan ibu kota negara ditinjau dari segi pertahanan maritim menghadapi sejumlah permasalahan yang dijumpai di antaranya:

1. Kekuatan TNI di pulau Kalimantan saat ini dirasa belum optimal dalam bidang Keamanan dan Maritim;
2. Lemahnya Sistem pertahanan Maritim Indonesia saat ini;
3. Kurangnya sinergitas antar institusi pemerintahan dengan operator atau *stakeholders* terkait.

Dalam memecahkan permasalahan terkait dengan pemindahan ibu kota negara ditinjau dari perspektif pertahanan maritim, maka landasan teori yang digunakan adalah Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang- Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Teori Strategi Maritim, yaitu teori yang digunakan negara dalam memelihara atau meningkatkan kekuatan laut dan bagaimana

negara mencoba menggunakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam masa damai dan masa perang.

Melalui penggunaan teori strategi maritim terhadap adanya upaya pemindahan ibu kota negara, maka akan tergambar secara konkrit mengenai upaya peningkatan kekuatan laut dalam rangka tercapainya tujuan, baik dalam masa damai maupun masa perang. Hal ini selaras dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemindahan ibu kota negara?
2. Apa saja strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi pemindahan ibu kota negara dari segi pertahanan maritim?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Menurut Creswell (2003), penelitian kualitatif merupakan proses pemahaman yang dilakukan melalui metode mencari tahu dalam mencari makna dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Mardalis seperti dikutip Iping dan Haeran (2021), penelitian kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Sedangkan Studi kasus menurut Creswell (2008) merupakan strategi penelitian yang di mana di dalamnya peneliti akan menyelidiki secara teliti dan cermat terhadap suatu program, peristiwa, proses, aktifitas, atau sekelompok individu. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dinilai sesuai untuk dilakukan karena penelitian ini berupaya memahami sebuah masalah sosial serta hubungan antar seluruh aktor yang terlibat di dalamnya. Analisis permasalahan dan pembahasan dilakukan secara mendalam menggunakan berbagai jenis sumber data mulai dari observasi lapangan, hingga wawancara mendalam dengan informan yang diolah dengan alat analisis berupa deskriptif analisis, sehingga perumusan saran

tindak untuk seluruh aktor yang terlibat dapat dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan memiliki keabsahan serta keterandalan data yang tinggi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kendala yang Dihadapi dalam Pemindahan Ibu Kota Negara dari Segi Pertahanan Maritim

Ibu kota dalam suatu negara memegang peranan yang sangat vital dan strategis, sehingga dari aspek pertahanan dan keamanan menjadikan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) dianggap sebagai *Center of Gravity* (CoG) (Kementerian Pertahanan RI, 2022). Sejarah peperangan modern mencatat bahwa Ibu Kota Negara selalu menempati posisi vital, baik dalam keadaan damai maupun perang. Strategi pertahanan IKN memiliki beberapa kekhasan dibandingkan dengan wilayah lain di dalam suatu negara. Pertama, IKN merupakan pusat pemerintahan di mana para pejabat utama lembaga negara tinggal dan berkegiatan. Penaklukan Ibu Kota Negara sebagai simbol kedaulatan nasional atau dekapitasi “orang-orang yang sangat penting” (*Very Important People / VIP*) merupakan salah satu upaya musuh untuk menghancurkan daya juang (*morale*) populasi guna memperoleh kemenangan (*victory*) dalam sebuah konflik antarnegara. Memang tidak semua perang menargetkan IKN ataupun dekapitasi VIP, seperti pada pengeboman Atom Amerika Serikat terhadap Jepang yang tidak menyasar Tokyo pada tahun 1945. Dalam konteks tertentu, tidak melakukan dekapitasi VIP diperlukan agar para pemimpin politik dapat memberikan pernyataan kekalahan perang. Pada kondisi lain, penangkapan VIP justru mempermudah kontrol atas populasi yang menjadi target perang (Maharani, 2022).

Kebanyakan negara memiliki Ibu Kota Negara yang multifungsi yaitu sebagai pusat politik, pusat pemerintahan, pusat kegiatan bisnis dan ekonomi, serta pusat semua yang mencirikan karakter dan keragaman secara menyeluruh dari sebuah negara. Ibu Kota Negara juga merefleksikan keunikan karakter suatu bangsa, seperti keberagaman suku bangsa, agama,

kebudayaan, dan haluan politik. Dalam perspektif hubungan internasional, Ibu Kota Negara juga menjadi gerbang utama dari suatu negara, tempat kedudukan perwakilan diplomatik negara lain dan organisasi internasional, serta menjadi miniatur suatu negara.

Secara operasional, gelar pertahanan IKN merupakan bagian dari postur pertahanan negara. Strategi “pertahanan mendalam” (*indepth defence*) menempatkan pihak yang bertahan untuk mengeksploitasi kelemahan musuh setelah pihak musuh berhasil untuk menguasai sebagian wilayah dan dengan demikian mengekspos dirinya. Efektivitas strategi ini berdasar pada fakta bahwa pihak yang melakukan serangan untuk menguasai wilayah lawan akan mengekspos kelemahan-kelemahannya dan membuka kesempatan dilakukannya serangan balik oleh pihak yang bertahan.

Operasionalisasi gelar pertahanan IKN juga dapat dikaitkan dengan konsep kedalaman strategis. Misalnya, negara yang memiliki keuntungan kedalaman strategis terutama Rusia dan Tiongkok dapat mengandalkan strategi pertahanan mendalam. Pendekatan strategis tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi pihak yang bertahan untuk menghindari kekalahan dan menemukan momentum untuk meraih kemenangan dalam perang. Hal ini dilakukan dengan mencegah pihak musuh (penyerang) merebut wilayah kunci, dan mencegah pihak musuh (penyerang) menguasai wilayah yang direbutnya. Sebaliknya, negara-negara seperti Singapura dengan defisit kedalaman strategis justru mengembangkan doktrin militer yang bertumpu pada pertahanan depan (*forward defence*), mobilitas strategis, serangan pendahuluan (*pre-emptive strike*) untuk mencegah pertempuran menyentuh ruang strategis seperti ibu kota negara. Sesungguhnya, strategi pertahanan mendalam dan pangkalan aju tidak perlu menjadi dikotomi. Operasionalisasi kombinasi dari kedua gelar ini ditemukan pada Tiongkok, yang mengaplikasikan strategi pertahanan mendalam sejak tahun 1990-an, tetapi kemudian bergerak kepada pangkalan aju pada dekade 2010-an melalui pembangunan “angkatan laut biru” (*Blue*

*Water Navy*) dan basis militer di luar negeri seperti di Laut China Selatan hingga pantai timur Afrika.

Pemindahan suatu Ibu kota tidak cukup hanya dengan persiapan fisik, tetapi harus melakukan proses kajian holistik dan menyeluruh terkait aspek-aspek yang berkaitan baik secara langsung dan tidak langsung. Termasuk aspek pertahanan, keamanan, ekonomi, budaya dan faktor-faktor strategis esensial lainnya. Hal paling penting adalah aspek pertahanan untuk mencegah agar pemindahan IKN tersebut tidak mudah diserang atau dimasuki militer asing. Dalam perspektif pertahanan, sebuah ibu kota harus mempertimbangkan posisi geografis dan infrastruktur pertahanan ibu kota baru sehingga tidak rentan dari serangan musuh.

Wilayah Kalimantan Timur merupakan provinsi yang strategis karena letak geografisnya berada di tengah-tengah Indonesia dan dikenal sebagai *Center of Indonesia*. Pemerintah telah menjatuhkan pilihan pada sebagian wilayah di Kalimantan Timur sebagai lokasi yang paling ideal sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru. Dalam sisi kemaritiman, wilayah Kalimantan Timur berada pada perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Hal ini sangat strategis untuk rantai konektivitas, jalur distribusi dan logistik di nusantara dan transportasi laut internasional.

Terkait dengan adanya perpindahan ibu kota ke Kalimantan timur, terdapat perubahan tata kelola khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur. Di dalamnya dimasukkan rencana pemerintah dalam proyeksi ke depan salah satunya yaitu membangun *Military Base* atau pangkalan militer trimatra (darat, laut, dan udara) untuk menunjang keamanan ibu kota baru. Pembangunan pangkalan militer ini dianggap tepat, karena Pangkalan itu diperlukan berkaitan dengan lokasi ibu kota baru berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

Berdasarkan uraian di atas dan dari hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pemindahan ibu kota negara dari segi pertahanan maritim adalah:

- a. Lemahnya sistem pertahanan maritim Indonesia

Sistem pertahanan maritim sangat penting menjadi prioritas utama dalam setiap pemindahan ibu kota negara. Sampai saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dari segi sistem pertahanan maritim Indonesia memang masih lemah, termasuk pada ibu kota negara baru di Kalimantan.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut adalah bagian dari TNI yang mempunyai tugas berdasarkan UU RI No. 34 Tahun 2004 Pasal 9, salah satu tugasnya adalah “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”. Terkait dengan teori peran Angkatan Laut, TNI AL memiliki andil yang besar untuk menjaga kedaulatan laut yang menurut Ken Booth memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi militer, polisionil dan diplomasi apabila dihubungkan dengan pemindahan ibu kota negara, ketiga fungsi tersebut memiliki peran penting terutama dikaitkan dengan pertahanan maritim.

Pada skenario terburuk, ketika kekuatan udara dan laut dapat dikalahkan musuh, yang menjadi tumpuhan terakhir adalah kekuatan TNI Angkatan Darat. Tetapi alangkah siapnya jika pada daerah pantai yang ada di daerah calon Ibu Kota Negara disiapkan sistem pertahanan *Coastal Defence* atau pertahanan pantai. Salah satu cara untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia adalah dengan menerapkan sistem pertahanan *Coastal Defence*. Pertahanan pesisir atau *Coastal Defence* adalah langkah-langkah yang diambil untuk memberikan perlindungan terhadap serangan militer di atau dekat garis pantai (atau garis pantai lainnya) (Brown, 1911). *Coastal Defence* adalah suatu sistem pertahanan pesisir yang menggunakan sistem radar, stasiun pengendali dan peluru kendali (rudal) untuk mengamankan wilayahnya. Saat ini, negara kita belum memiliki sistem pertahanan pesisir *Coastal Defence*. Dengan adanya sistem pertahanan rudal yang ada di daerah pantai Ibu Kota Negara,

menjadikan daerah tersebut aman dari ancaman dari musuh yang menyerang Ibu Kota. Selain itu, efek *deterent* yang ditimbulkan akan sangat signifikan mengingat sistem pertahanan *Coastal Defence* tersebut sudah banyak diterapkan oleh negara-negara maju.

Sistem pertahanan maritim Indonesia dapat juga ditingkatkan dengan menjadikan para pelaku ekonomi di laut sebagai mata dan telinga untuk memonitor kejadian terkini. Setiap ada informasi yang penting, para pelaku ekonomi di laut termasuk nelayan bisa menginformasikan kepada petugas terdekat ataupun melalui radio panggil supaya kejadian tersebut bisa segera ditindak lanjuti. Informasi itu bisa mengenai pelanggaran batas wilayah, *illegal logging*, *illegal fishing* atau mengenai penyelundupan narkoba, senjata ilegal dan *Human trafficking*. Dengan bantuan dari seluruh komponen bangsa, pertahanan negara khususnya pertahanan maritim kita akan menjadi lebih solid dan kuat. Atas informasi intelejen dari pelaku ekonomi, tingkat kehadiran unsur-unsur KRI kita di seluruh wilayah laut Yuridiksi Indonesia dapat dioptimalkan sebaik mungkin.

- b. Kurangnya Sinergitas antar Institusi Pemerintahan dengan Operator atau *Stakeholders* Terkait

Sinergitas antar institusi pemerintahan dengan operator atau *stakeholders* terkait juga sampai saat ini masih kurang. Padahal mereka harus saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Semua harus melupakan ego sektoral masing-masing supaya pemindahan Ibu Kota Negara dapat berjalan sesuai rencana tujuan nasional dalam pemindahan ibu kota negara.

2. Strategi yang Harus Dilakukan dalam Menghadapi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Segi Pertahanan Maritim

Berdasarkan hasil penelitian, maka strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan adalah:

- a) Melakukan perubahan Gelar Kekuatan TNI untuk Keamanan Ibu Kota Negara

Langkah perubahan Gelar Kekuatan TNI untuk Keamanan Ibu Kota Negara dilakukan mengingat selama ini sinergitas antar institusi pemerintahan dengan operator atau *stakeholders* terkait dalam mendukung kesuksesan terlaksananya pemindahan ibu kota negara masih kurang. Langkah pemindahan ibu kota negara memperlihatkan bahwa upaya tersebut menguntungkan, baik secara strategis maupun taktis. Namun, keuntungan itu tidak cuma-cuma. Strategi perlu dirancang serta disesuaikan, terutama gelar kekuatan TNI di Kalimantan harus diperkuat baik secara kuantitas dan kualitas.

Kebijakan Pemerintah untuk memindahkan ibukota negara memperlihatkan bahwa pergeseran tersebut harus disikapi dan dipedomani oleh instansi-instansi Pemerintahan di bawahnya, juga harus didukung penuh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini membutuhkan komitmen tinggi semua pemangku kepentingan, khususnya dari sisi anggaran. Hal ini dikarenakan kekuatan TNI di Kalimantan saat ini belum optimal untuk Pertahanan Indonesia khususnya di bidang Keamanan Maritim.

Menurut Undang-undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 10 ayat (3) yang salah satu isinya berbunyi: “mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah dituntut untuk selalu siap menghadapi segala bentuk ancaman yang mengancam keutuhan serta kedaulatan negara. Setiap personel TNI harus memiliki kesiapkesiagaan untuk diterjunkan pada setiap operasi, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Berdasarkan Undang-undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 4 ayat (1) berbunyi: “TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima”. TNI sebagai komponen utama pertahanan,

memerlukan acuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokoknya. Oleh karena itu, pemerintah perlu didorong untuk segera menyusun suatu strategi nasional yang menjadi kesepakatan semua komponen bangsa, yang oleh Departemen Pertahanan (bekerja sama dengan TNI) akan diterjemahkan menjadi suatu strategi pertahanan yang disesuaikan dengan kondisi geografis negara dengan melibatkan segenap instrumen kekuatan nasional. Sehingga pada gilirannya nanti, masing-masing angkatan akan dapat menjadikan strategi pertahanan tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan kekuatan dan penyusunan doktrin pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Tentunya dengan tetap mengingat bahwa semua ini hanya akan dapat terwujud apabila aspek lainnya seperti politik, hubungan luar negeri maupun ekonomi juga berjalan secara terpadu.

Gelar kekuatan bagi TNI diharapkan akan mampu melindungi ibu kota dari arah darat, laut, dan udara. Dari arah darat, Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Negara Malaysia suatu saat bisa menjadi ancaman untuk negara kita, karena perkembangan lingkungan strategis ke depan bersifat dinamis yang tidak dapat diprediksi. Kekuatan TNI harus lebih superior di Pulau Kalimantan jika dibandingkan dengan kekuatan Angkatan Bersenjata Malaysia. Menghitung kekuatan Malaysia harus mempertimbangkan potensi pengerahan kekuatan FPDA (*Five Power Defense Arrangement*) yang terdiri atas Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura (Mahroza, 2019). Dengan perpindahan ibu kota Negara kita ke Kalimantan, Malaysia seharusnya bisa memahami mengapa gelar TNI ditingkatkan di Kalimantan. Akan tetapi, komunikasi dengan pemerintah Malaysia memang harus terus dibangun agar tidak terjadi penafsiran lain yang menyebabkan Malaysia merasa terancam dengan penambahan kekuatan TNI di Kalimantan.

Dalam rangka memperkuat pertahanan darat, maka di Kalimantan perlu dibangun satu Kodam baru, lengkap dengan kekuatan satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan bantuan administrasinya sehingga idealnya ada Tiga Kodam di lima provinsi. Sama seperti strategi yang dilakukan di Pulau Jawa. Saat ini di Pulau Kalimantan terdapat dua Kodam. Kodam VI/Mulawarman di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Wilayahnya meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kodam XII/Tanjungpura di kabupaten Kubu Raya. Wilayahnya meliputi Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tambahan pembentukan satu Kodam baru tersebut diharapkan dapat menambah kekuatan pasukan di pulau Kalimantan yang secara geografis luas wilayahnya lebih luas bila dibandingkan dengan Pulau Jawa.

Medan laut sekitar Kalimantan Timur (Kaltim) lebih sempit, mulai ujung utara dan selatan Alur Laut Kepulauan Indonesia II jika dibandingkan dengan medan laut di Jakarta yang terbuka sangat luas. Kemudian, posisi geografis yang persis di tengah-tengah Indonesia memudahkan mengonsentrasikan kekuatan TNI dari timur, barat, utara, dan selatan bila ibu kota negara diserang. Sebaliknya, bila ada kebutuhan pasukan untuk dikerahkan dari Kalimantan relatif lebih dekat. Mungkin ada yang mengatakan bahwa dengan kemajuan teknologi, posisi geografis tidak lagi penting. Jarak jangkauan misil atau peluru kendali (Rudal) bisa mencapai ratusan kilometer, jadi cukup menyerang dari jauh. Kemampuan satelit juga sangat canggih bisa mendeteksi sampai ke dalam hutan. Mungkin ini bisa benar kalau tujuan serangan hanya untuk melumpuhkan suatu negara, tidak sampai menduduki negara tersebut. Untuk menduduki suatu negara mau tidak mau tetap harus menggunakan pasukan darat yang digerakkan ke daerah pertempuran.

Adanya perubahan beberapa wilayah di Kalimantan Timur seperti Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan sekitarnya menjadi calon ibu kota negara, tentunya dibutuhkan peningkatan kekuatan guna mendukung pertahanan dan keamanan di sektor laut. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) sangat diperlukan untuk melaksanakan pertahanan di sektor laut. Pangkalan TNI Angkatan Laut yang berada di dekat calon Ibu Kota Negara saat ini adalah Lanal Balikpapan. Wilayah kerja Lanal Balikpapan meliputi Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Kedudukan Lanal Balikpapan secara organisasi berada di bawah Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIII Tarakan. Posisi lanal Balikpapan yang dekat dengan calon Ibu Kota Negara, seharusnya statusnya bisa dinaikkan dari Lanal menjadi Lantamal. Lanal Balikpapan sangat perlu untuk melakukan perubahan organisasi yang disertai peningkatan kemampuan atau penambahan jumlah kekuatan. Gelar kekuatan Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan saat ini dirasa belum mampu dalam mengoptimalkan Pertahanan Indonesia di bidang Keamanan Maritim. Hal ini karena kekuatan unsur gelar yang dimiliki oleh Lanal Balikpapan saat ini masih kurang guna mencukupi *coverage* area wilayah kerja, dan unsur yang ada saat ini hanya terdiri dari 1 Kal dan 5 Patkamla dengan usia pakai yang sudah lama serta kondisi teknis yang harus senantiasa dijaga atau dipertahankan.

Dalam menghadapi permasalahan terkait kekuatan gelar Lanal Balikpapan saat ini, upaya yang dilakukan adalah perlu adanya penambahan unsur gelar yang lebih baru dan modern serta memiliki kemampuan persenjataan yang lebih modern sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Apabila dihadapkan dengan kondisi cuaca yang selalu berubah dan cenderung ekstrim, paling tidak ukuran kapalnya lebih besar setingkat KRI. Upaya lain yang dapat dilakukan

adalah dengan merubah susunan organisasi dan status lanal Balikpapan menjadi Lantamal, dengan menjadi Lantamal maka efek *deterent* yang ditimbulkan akan semakin tinggi. Apabila menjadi Lantamal, unsur KRI yang di gelar juga pasti harus ditambah, disamping itu juga harus ada Batalyon Marinir Pertahan Pangkalan (Yon Marhanlan) di Balikpapan. Bertambahnya gelar kekuatan pertahanan laut, pasti akan berpengaruh pada tingkat keamanan dan ketertiban wilayah perairan ALKI II. Selain itu, perlu adanya desain ulang tentang disposisi gelar kapal selam supaya lebih efektif melindungi ibukota negara. Kekuatan ini akan memperkuat kekuatan yang sudah ada di Armada I (Jakarta), Armada II (Surabaya), dan Armada III (Sorong).

Selanjutnya, dari segi kekuatan pertahanan udara juga harus ada penambahan pada tempat-tempat yang strategis untuk melindungi ibu kota negara. Pangkalan udara di tiap provinsi menjadi penting untuk mendukung mobilisasi pasukan darat dan untuk proyeksi kekuatan pesawat-pesawat tempur. Kekuatan udara merupakan unsur pelindung pertama yang akan membentengi sistem pertahanan Nasional kita. Ketika Kekuatan udara dapat dikalahkan oleh musuh, baru setelah itu unsur kekuatan laut yang akan melakukan perlawanan. Walaupun untuk realita di daerah pertempuran pasti unsur laut dan udara selalu berkolaborasi bersama-sama untuk bisa menghalangi musuh yang ingin menyerang negara kita.

Kekuatan TNI di Kalimantan harus didesain untuk mampu diproyeksikan lebih efektif untuk mendukung pengerahan ke wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Dengan posisi geografis Kalimantan di tengah-tengah Indonesia, hal ini akan lebih mudah dilakukan karena jarak yang lebih dekat. Pemindahan ibu kota RI ke Kalimantan Timur dirancang untuk visi jangka panjang, menyongsong Indonesia Maju 2050. Rancangan pertahanan negara 2050, khususnya perlindungan terhadap ibu kota sebagai *centre of gravity* Indonesia

harus menjadi bagian penting dari rancangan itu. Pertahanan negara menyangkut kedaulatan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena itu, dibutuhkan visi bersama dan komitmen yang tinggi dari segenap komponen bangsa untuk mewujudkannya. Dalam perubahannya peningkatan kemampuan atau penambahan kekuatan harus melalui proses kajian maupun pendalaman terlebih dahulu berdasarkan analisa ancaman yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan di IKN yang baru di tingkat komando atas.

b. Melaksanakan Perubahan Strategi Pertahanan

Lemahnya sistem pertahanan maritim Indonesia diatasi dengan melaksanakan perubahan strategi pertahanan. Tujuan dari perubahan strategi pertahanan tersebut adalah agar selalu dapat menjaga keamanan lalu lintas pelayaran di seluruh wilayah laut NKRI.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut adalah bagian dari TNI yang mempunyai tugas berdasarkan UU RI No. 34 Tahun 2004 Pasal 9, salah satu tugasnya adalah “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”. Terkait dengan teori peran Angkatan Laut, TNI AL memiliki andil yang besar untuk menjaga kedaulatan laut yang menurut Ken Booth memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi militer, polisionil dan diplomasi apabila dihubungkan dengan pemindahan ibu kota negara, ketiga fungsi tersebut memiliki peran penting terutama dikaitkan dengan pertahanan maritim.

Pada skenario terburuk, ketika kekuatan udara dan laut dapat dikalahkan musuh, yang menjadi tumpuhan terakhir adalah kekuatan TNI Angkatan Darat. Tetapi alangkah siapnya jika pada daerah pantai yang ada di daerah calon Ibu Kota Negara disiapkan sistem pertahanan *Coastal Defence* atau pertahanan pantai. Salah satu cara untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia adalah dengan menerapkan sistem pertahanan *Coastal Defence*. Pertahanan pesisir

atau *Coastal Defence* adalah langkah-langkah yang diambil untuk memberikan perlindungan terhadap serangan militer di atau dekat garis pantai (atau garis pantai lainnya) (Brown, 1911). *Coastal Defence* adalah suatu sistem pertahanan pesisir yang menggunakan sistem radar, stasiun pengendali dan peluru kendali (rudal) untuk mengamankan wilayahnya. Saat ini, negara kita belum memiliki sistem pertahanan pesisir *Coastal Defence*. Dengan adanya sistem pertahanan rudal yang ada di daerah pantai Ibu Kota Negara, menjadikan daerah tersebut aman dari ancaman dari musuh yang menyerang Ibu Kota. Selain itu, efek *deterent* yang ditimbulkan akan sangat signifikan mengingat sistem pertahanan *Coastal Defence* tersebut sudah banyak diterapkan oleh negara-negara maju.

Sistem pertahanan maritim Indonesia dapat juga ditingkatkan dengan menjadikan para pelaku ekonomi di laut sebagai mata dan telinga untuk memonitor kejadian terkini. Setiap ada informasi yang penting, para pelaku ekonomi di laut termasuk nelayan bisa menginformasikan kepada petugas terdekat ataupun melalui radio panggil supaya kejadian tersebut bisa segera ditindak lanjuti. Informasi itu bisa mengenai pelanggaran batas wilayah, *illegal logging*, *illegal fishing* atau mengenai penyelundupan narkoba, senjata ilegal dan *Human trafficking*. Dengan bantuan dari seluruh komponen bangsa, pertahanan negara khususnya pertahanan maritim kita akan menjadi lebih solid dan kuat. Atas informasi intelejen dari pelaku ekonomi, tingkat kehadiran unsur-unsur KRI kita di seluruh wilayah laut Yuridiksi Indonesia dapat dioptimalkan sebaik mungkin.

c. Meningkatkan Kerja Sama antara Satu dengan yang Lainnya

Dalam mengatasi kurangnya sinergitas antar institusi pemerintahan dengan operator atau *stakeholders* terkait, harus saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Semua harus melupakan ego sektoral masing-masing supaya pemindahan Ibu Kota Negara dapat berjalan sesuai rencana tujuan nasional kita.

Adanya pemindahan ibu kota baru, tentu akan membuat perubahan-perubahan yang mempengaruhi banyak aspek. Dalam tata kelola maritim tentunya diperlukan kerjasama dan sinergi untuk menjaga keamanan dan pertahanan, keselamatan lalu lintas pelayaran, serta kelancaran perdagangan jalur laut. Dalam menghadapi perubahan ini, PT. Pelindo IV menjelaskan bahwa perlu bersinergi dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Laut/Syahbandar, Bea Cukai/Pabean, Imigrasi, Karantina, Kesehatan. Selain dengan instansi-instansi tersebut, PT. Pelindo IV juga bermitra dengan perusahaan-perusahaan pelaku ekonomi yang menggunakan media laut. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan menjelaskan bahwa dalam menunjang IKN memiliki tugas yang sama sesuai dengan tugas dasar dari KSOP itu sendiri. Dalam hal pemindahan ibu kota, KSOP Kelas I Balikpapan bekerja sama dengan PT. Pelindo IV dalam proses pelayaran dan pelabuhan, di mana PT. Pelindo IV bertugas dalam bidang kepelabuhanan sedangkan KSOP Kelas I Balikpapan bertugas dalam seluruh pengawasan kegiatan pelayaran dan pelabuhan yang ada di wilayah kerjanya. KSOP Kelas I Balikpapan dalam menyambut pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan berbagai instansi yang ada, seperti Pangkalan TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, dan Kesehatan Pelabuhan. Semua kerjasama dilakukan berkaitan dengan mendukung proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. KSOP Kelas I Balikpapan juga bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses penentuan daerah/wilayah dalam proses pembangunan infrastruktur yang mendukung IKN.

Hubungan komunikasi dan kerjasama pangkalan TNI Angkatan Laut dengan Pelindo IV dan KSOP I Balikpapan selama ini telah berjalan dengan baik. Kebutuhan dukungan faslabuh dan perbekalan armada tempur untuk unsur-unsur KRI yang beroperasi selama ini

telah terdukung dengan baik, meskipun Lanal Balikpapan tidak memiliki Dermaga sendiri. Lanal Balikpapan senantiasa memberikan dukungan kepada Pelindo IV dan KSOP I Balikpapan dalam pelaksanaan tugas mereka dalam mengatur lalu lintas dan penempatan kapal-kapal niaga di alur pelayaran dengan cara membantu penertiban kapal-kapal yang bergerak di sekitar alur pelayaran untuk menghindari terjadinya Laka Laut dan memberikan bantuan SAR apabila terjadi situasi kedaruratan.

Peningkatan kerjasama antara TNI, Bakamla, Polairud, Beacukai, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan para pelaku perekonomian termasuk nelayan, supaya tercipta sinergitas para pemangku kepentingan di laut. Pelaksanaan kegiatan bersama secara psikologis dapat meningkatkan kekompakan diantara masing-masing personal. Diharapkan antar instansi tidak ada kecanggungan ataupun rasa memberatkan dalam berkoordinasi karena semua itu merupakan tuntutan untuk turut mensukseskan kebijakan pemerintah tentang pemindahan Ibu Kota Negara.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas bahwa dalam kesiapan perpindahan Ibu Kota Negara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi dalam pemindahan ibu kota negara dari segi pertahanan maritim adalah lemahnya sistem pertahanan maritim Indonesia serta kurangnya sinergitas antar institusi pemerintahan dengan operator atau *stakeholders* terkait.
2. Strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi pemindahan ibu kota negara dari segi pertahanan maritim adalah melakukan perubahan Gelar Kekuatan TNI untuk keamanan Ibu Kota Negara, melaksanakan perubahan strategi pertahanan serta meningkatkan kerja sama antara satu dengan yang lainnya.

Adapun saran yang dapat dikemukakan berdasarkan kajian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kekuatan dan penambahan jumlah unsur gelar pada Kodam, Lanal dan Lanud guna mendukung pertahanan di wilayah calon Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur, yang diharapkan tingkat atau strata organisasi, jumlah personel dan alutsista yang ada dirombak berdasarkan hasil analisa ancaman yang berpotensi muncul dan akan mengganggu kelancaran jalannya pemerintahan negara.
2. Perlu dilakukan pengawasan dan pengontrolan tingkat kemajuan atau pencapaian terhadap seluruh rencana perubahan yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam menyongsong perpindaham Ibu Kota Negara baru.
3. Perlu adanya pengkajian mengenai pembangunan infrastruktur dan teknologi apa yang mendukung pertahanan maritim oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dalam mendukung proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alika, Rizky, "Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara Tetap Jalan di Tengah Pandemi Corona", diakses 28 April 2022, <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5f368ded45bfa/proyek-pemindahan-ibu-kota-negaratetap-jalan-di-tengah-pandemicorona>
- Booth, Ken. (1977). *Navies and Foreign Policy*. ed.1. (London: Routledge).
- Brown, William Baker. (1911). *Coast Defence*. In *Chisholm, Hugh (ed.)*. *Encyclopædia Britannica*. Vol. 6 (11th ed.). England: Cambridge University Press.
- Iping, Baso dan Haeran. (2021). "Perkuliahan Daring dan Tatap Muka: Antara Cita dan Realita". *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, Vol. 2, No. 2 Juli 2021, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/705>

- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2017). *Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia, 2017).
- Maharani, Curie, dkk. (2022). *Pertahanan Ibu Kota Negara Strategi dan Gelar Militer*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.
- Mahroza, Jonni. (2019). *Pemindahan Ibu Kota RI dari Perspektif Pertahanan*, Media Indonesia, 04 September 2019.
- Purnama, Suryadi Jaya dan Chotib. (2022). “Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara (*Analysis of The National Capital Relocation Policy*), *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(2), 2022, 155-168.
- Putro, Herlambang Suryo dan Sumiyat. (2022). “Peran TNI AL dalam Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia”. *Jurnal Maritim Indonesia*, Agustus 2022, Volume 10 Nomor 2, 118-131.
- Ryano, Mikhael. (2020). *Pertahanan Maritim Indonesia Era Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019 Terkait Dinamika Peningkatan Kekeuatan di Kawasan Indo-Pasifik*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Saputra, Surya Dwi, Thomas Gabriel J, dan Mhd Halkis. (2021). “Analisis Strategi Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara)”. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021, 192-220.
- Sirmareza, Trio. “Naval Diplomacy Dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon”, *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol.3. No.1., Januari 2017.
- Taufik, M., *Pemindahan Ibu Kota dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi. Prosiding Seminar Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara 2017*, November 2017.
- Vabian, Thomas Vincent, “Untung Rugi Menunda Proyek Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi COVID-19”, diakses 29 April 2022, <https://tirto.id/f4gz>.
- Witjaksono, Tatit Eko. (2020). *Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Maritim Guna Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI*, diakses 1 Mei 2023, <https://seskoal.ac.id/artikel/23>